Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, page 350-362

Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Siswa

Ali Iskandar Zulkarnain[1], Arya Fadly Ramadhan Indarto[2], Muhammad Alief Raihan Ramadhan[3], Rizki Alfajri Firdaus[4]
[1,2,3,4] IAIN Palangka Raya
Corresponding Author: Muhammad Alief Raihan Ramadhan, e-mail: aliefraihanramadhan10@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PKn dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari studi literatur dan observasi terhadap praktik pembelajaran PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial melalui metode pembelajaran aktif seperti diskusi, simulasi, dan proyek sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurikulum yang kurang kontekstual dan rendahnya partisipasi siswa. Kesimpulannya, PKn yang dilaksanakan secara interaktif dan kontekstual dapat memperkuat karakter siswa sebagai warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pendidikan kewarganegaraan, kesadaran kewarganegaraan, hak dan kewajiban siswa, pendidikan karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta tanggung jawab sosial kepada siswa. Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan sosial dan politik, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara menjadi semakin krusial agar individu dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman siswa terhadap hak dan kewajibannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurikulum yang kurang relevan, metode pembelajaran yang kurang menarik, serta minimnya praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana PKn dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran PKn dalam membangun pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta

memberikan solusi agar pembelajaran PKn lebih efektif dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, diharapkan PKn dapat menjadi sarana yang lebih optimal dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dan dokumen resmi yang membahas topik pendidikan kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasi, dan mensintesis informasi dari berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

a. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan dan Tujuan Utamanya dalam Sistem Pendidikan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau civic education merupakan program pendidikan yang bersifat interdisipliner dan multidimensional, berakar pada ilmu sosial serta disiplin ilmu politik. PKn bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini menjadi sarana untuk menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi.

Menurut Nu'man Soemantri, PKn berlandaskan demokrasi politik yang berkembang seiring kemajuan ilmu lainnya. Program ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memahami serta menerapkan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Soemantri (2001), PKn merupakan upaya memberikan pengetahuan serta kemampuan dasar tentang hubungan antara warga negara dan negara, serta pendidikan bela negara sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Terdapat tiga paradigma utama dalam penerapan PKn:

1. **Aspek Kurikulum:** PKn dirancang untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.
2. **Aspek Teoritis:** PKn mencakup aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik yang berkaitan dengan nilai, konsep, dan moral Pancasila, demokrasi, serta ketahanan nasional.
3. **Aspek Praktis:** PKn mengajarkan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan

sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat secara luas.

Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun pemahaman bahwa demokrasi merupakan sistem yang menjamin hak-hak warga negara. PKn mendorong setiap individu untuk memahami dan menjalankan perannya sebagai warga negara yang sadar hukum, memiliki nasionalisme tinggi, serta mampu mengatasi perbedaan melalui musyawarah mufakat.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila, norma-norma dalam UUD 1945, serta komitmen terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan Republik Indonesia. Melalui pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik, PKn membangun kesadaran tentang pentingnya demokrasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ahmad Sanusi dan Cholisin, tujuan PKn yang lebih spesifik meliputi:

1. Menjamin hak-hak dasar warga negara sesuai dengan konstitusi.
2. Menanamkan kesadaran nasionalisme dan kebangsaan.
3. Meningkatkan kesadaran politik dan sipil melalui pendidikan.
4. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan sadar akan hak serta kewajibannya.
5. Mempromosikan praktik demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
6. Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan publik.
7. Menjadikan sekolah sebagai laboratorium demokrasi untuk latihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
8. Mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan.
9. Membangun pemahaman dan kerja sama internasional guna menciptakan harmoni global.

Dengan berbagai tujuan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mencetak individu yang tidak hanya memiliki pemahaman tentang konsep kenegaraan, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari serta membangun masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial.

b. Materi yang Diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Melalui kurikulum yang dirancang khusus, PKn bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan

   Materi ini membahas definisi warga negara, status kewarganegaraan, serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pemahaman ini penting untuk mengetahui siapa saja yang berhak dan berkewajiban sebagai bagian dari suatu negara.

2. Hak-Hak Warga Negara

   Pembelajaran mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia lainnya. Materi ini menekankan bahwa hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Warga Negara

   Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam upaya bela negara. Materi ini menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

4. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

   Materi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara diajarkan untuk tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Keseimbangan ini esensial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

5. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Hak Asasi Manusia

   PKn juga berperan sebagai pilar dalam pendidikan hak asasi manusia. Melalui PKn, siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

6. Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari

   Materi ini mengajarkan bagaimana menerapkan hak dan kewajiban dalam konteks nyata, seperti di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Dengan memahami materi-materi tersebut, diharapkan siswa dapat menginternalisasi nilai- nilai kewarganegaraan yang baik, sehingga mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Konteks Kewarganegaraan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek penting dalam kehidupan bernegara. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada setiap individu sebagai bagian dari negara, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh individu demi kepentingan bersama. Dengan memahami dan

menjalankan hak serta kewajiban dengan baik, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera.

b. Contoh Hak dan Kewajiban

c. Hak-Hak Warga Negara yang Dijamin oleh NegaraB

Berikut adalah beberapa hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara:

d. Hak atas Pendidikan

- Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
- Negara bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

2. Hak atas Kesehatan

- Warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
- Negara harus menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan terjangkau.

3. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

- Setiap individu berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
- Negara wajib menciptakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja.

4. Hak atas Perlindungan Hukum

- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.
- Negara harus menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.

5. Hak atas Kebebasan Berpendapat

- Warga negara bebas menyampaikan pendapat dan berekspresi secara bertanggung jawab.
- Negara harus menjamin kebebasan berbicara tanpa ancaman atau tekanan.

2. Kewajiban Warga Negara[2]

e. Selain hak, warga negara juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan demi kesejahteraan bersama:

1. Membayar Pajak

- Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menaati Hukum

- Warga negara harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Ketaatan terhadap hukum menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

3. Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- Setiap individu bertanggung jawab menjaga ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.
- Tindakan seperti tidak membuat kerusuhan dan menjaga fasilitas umum adalah bentuk kepatuhan terhadap kewajiban ini.

4. Turut serta dalam Membela Negara

- Dalam keadaan tertentu, warga negara harus siap berpartisipasi dalam mempertahankan negara dari ancaman.
- Bentuk bela negara bisa berupa wajib militer, bakti sosial, atau kontribusi dalam bidang lainnya.

5. Menghormati Hak Orang Lain

- Setiap individu harus menghormati hak dan kebebasan orang lain agar tidak terjadi konflik sosial.
- Menghargai perbedaan dan toleransi antar sesama adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara.

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika setiap warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka ketidakseimbangan sosial dapat terjadi. Sebaliknya, jika setiap individu menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa mengabaikan hak-haknya, maka stabilitas sosial dan kesejahteraan akan lebih mudah tercapai. Oleh karena itu, memahami serta menerapkan hak dan Kewajiban dengan baik adalah kunci utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

3. Peran PKn dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui mata pelajaran ini, siswa dapat mengenal lebih dalam tentang konsep kewarganegaraan, demokrasi, serta peran mereka dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat menjadi individu yang lebih sadar akan hak-haknya dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. PKn tidak hanya sekadar menyampaikan teori tentang kewarganegaraan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dalam menanggapi berbagai isu sosial. Salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam PKn adalah diskusi kasus[3], di mana siswa diajak untuk menganalisis peristiwa nyata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, melalui studi kasus tentang kebebasan berpendapat, siswa dapat memahami bagaimana hak ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta batasan-batasannya agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Selain diskusi kasus, metode pembelajaran lain yang dapat meningkatkan pemahaman siswa adalah simulasi. Simulasi seperti pemilihan ketua kelas yang meniru proses pemilu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana demokrasi bekerja. Dengan mengikuti proses pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara, siswa dapat memahami pentingnya berpartisipasi

dalam sistem demokrasi serta bagaimana suara mereka memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin.

Metode lain yang dapat diterapkan dalam PKn adalah pembelajaran berbasis proyek[5]. Dalam metode ini, siswa diberikan tugas untuk membuat proyek yang berhubungan dengan kewarganegaraan, seperti mengadakan kampanye kesadaran hukum atau proyek sosial yang melibatkan komunitas setempat. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar secara teori tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat memperkuat pemahaman mereka tentang peran sebagai warga negara yang baik.

PKn juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dalam diri siswa. Melalui pembelajaran PKn, siswa diajarkan untuk menghargai keberagaman budaya, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta memahami sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian, mereka dapat lebih menghargai identitas nasional dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air.

Selain itu, PKn membantu siswa untuk lebih memahami sistem pemerintahan yang berlaku di negaranya. Dengan memahami struktur pemerintahan dan fungsi lembaga-lembaga negara, siswa dapat mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Kesadaran ini penting agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

PKn bukan hanya sekadar mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, tetapi memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan metode pembelajaran yang tepat, PKn dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa. Jika pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban semakin baik, maka mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan sosial serta politik di masa depan.

4. Dampak Positif Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran sentral dalam membangun karakter siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendidikan ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis mengenai konsep kewarganegaraan tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Hak serta Kewajiban

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengajarkan kepada siswa bahwa setiap individu dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami serta dijalankan. Pemahaman ini sangat penting karena berkaitan dengan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa diajarkan mengenai berbagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan pemahaman ini, mereka

menjadi lebih sadar akan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjamin hak-hak tersebut.

Selain memahami hak-haknya, siswa juga belajar tentang kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan berpartisipasi dalam pemilu. Kesadaran ini membentuk karakter mereka agar tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami hak dan kewajibannya, siswa lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, seperti mengikuti kegiatan bakti sosial, bergabung dalam organisasi pemuda, atau bahkan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga mendorong kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. PEMBENTUKAN SIKAP KRITIS DAN PARTISIPATIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk pola pikir siswa agar lebih kritis terhadap berbagai permasalahan sosial dan politik. Salah satu kemampuan yang dikembangkan adalah berpikir kritis, di mana siswa dilatih untuk memilah informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi hoaks yang banyak beredar di media sosial. Dengan kemampuan ini, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak valid.

Selain itu, PKn mendorong siswa untuk berani menyampaikan pendapat mereka dalam forum-forum diskusi, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Hal ini membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan membangun kesadaran akan pentingnya kebebasan berpendapat. Sikap ini juga melatih siswa agar lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam menyampaikan pendapatnya.

Pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial. Siswa diajak untuk mengikuti kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, dan aksi kemanusiaan, sehingga mereka dapat merasakan dampak nyata dari nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman ini, mereka belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan memahami bahwa kontribusi kecil dapat memberikan perubahan yang berarti dalam masyarakat.

3. PENGUATAN KARAKTER SISWA SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam membentuk karakter siswa agar memiliki integritas dan kesadaran sosial yang tinggi. Salah satu nilai penting yang diajarkan adalah toleransi, di mana siswa dibiasakan untuk menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan politik dalam masyarakat. Sikap toleran ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman yang ada.

Selain itu, PKn menanamkan nilai kejujuran sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan transparan. Kejujuran dalam berperilaku dan berinteraksi menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang penuh kepercayaan. Nilai ini juga memperkuat karakter siswa agar lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Disiplin juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa. Mereka diajarkan untuk menghargai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, baik dalam konteks sekolah maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dengan disiplin, siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih teratur dan berkomitmen terhadap tugas dan kewajibannya.

Selain itu, PKn mengajarkan pentingnya kepedulian sosial, seperti membantu sesama, peduli terhadap lingkungan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai kepedulian ini, diharapkan siswa tumbuh menjadi warga negara yang memiliki empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Melalui berbagai kegiatan sosial, mereka dapat memahami bahwa kontribusi mereka, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan PKn di sekolah sering kali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal

a. Kurikulum yang Tidak Relevan dengan Kondisi Sosial dan Politik Saat Ini

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah kurikulum yang tidak selalu mengikuti perkembangan sosial dan politik yang terjadi. Banyak materi PKn yang lebih menekankan teori tanpa memberikan contoh nyata dari peristiwa sosial dan politik yang sedang berlangsung. Akibatnya, siswa merasa sulit untuk menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang aplikatif.

Selain itu, kurikulum PKn perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan politik terkini. Dengan adanya pembaruan, siswa dapat memahami bagaimana prinsip- prinsip kewarganegaraan diterapkan dalam situasi yang nyata. Kurikulum yang lebih dinamis dan kontekstual akan membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

b. Kurangnya Metode Pembelajaran yang Menarik

Metode pengajaran yang kurang menarik sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendekatan yang terlalu konvensional, seperti ceramah dan hafalan, dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Ketika materi disampaikan secara monoton tanpa keterlibatan aktif siswa, mereka cenderung hanya menghafal tanpa benar-benar memahami makna dari konsep yang diajarkan.

Selain itu, kurangnya interaksi dalam pembelajaran menyebabkan siswa menjadi pasif dan kesulitan dalam menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. Untuk mengatasi tantangan ini, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi dan debat, serta simulasi sidang atau pemilu. Metode-metode ini dapat meningkatkan partisipasi siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis, serta memberikan pengalaman langsung dalam memahami prinsip-prinsip kewarganegaraan.

c. Minimnya Keterlibatan Siswa dalam Praktik Nyata

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menerapkan konsep yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Banyak sekolah yang hanya menekankan aspek teori tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan kewarganegaraan. Akibatnya, pemahaman mereka terhadap konsep kewarganegaraan menjadi terbatas dan kurang bermakna. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah dapat mengembangkan berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, seperti program bakti sosial, kunjungan ke lembaga pemerintahan, dan forum diskusi dengan tokoh masyarakat. Dengan adanya kegiatan praktis ini, siswa dapat lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip kewarganegaraan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap
lingkungan sosial.

d. Kendala dalam Penerapan Nilai-Nilai PKn di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Meskipun nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan di sekolah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih sering mengalami kendala. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kurangnya keteladanan dari lingkungan. Siswa cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka. Jika lingkungan tidak memberikan contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan, maka pembelajaran di sekolah menjadi kurang efektif dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, pengaruh media sosial juga menjadi tantangan dalam pembentukan karakter kewarganegaraan siswa. Di era digital saat ini, siswa lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dalam memilah informasi yang benar dan bermanfaat agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh konten yang dapat menyesatkan.

Minimnya pengawasan dari guru dan orang tua juga menjadi hambatan dalam penerapan nilai-nilai PKn. Tanpa pengawasan yang cukup, siswa kurang terdorong untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari di sekolah. Oleh sebab itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat lebih efektif dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, nilai-nilai kewarganegaraan dapat benar-benar tertanam dalam diri siswa dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui pembelajaran PKn, siswa tidak hanya memperoleh wawasan tentang konsep kewarganegaraan tetapi juga didorong untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hak, siswa menjadi lebih sadar akan peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sementara pemahaman tentang kewajiban mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik. Selain itu, PKn juga membentuk sikap kritis, toleransi, dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan sosial dan politik, metode pembelajaran yang cenderung konvensional dan kurang menarik, serta minimnya keterlibatan siswa dalam praktik nyata. Untuk meningkatkan efektivitas pengajaran PKn, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual. Guru dapat menerapkan metode seperti diskusi kelompok, simulasi sidang, pembelajaran berbasis proyek, serta kunjungan ke lembaga pemerintahan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa.

Selain itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai PKn dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya keterlibatan semua pihak, PKn dapat lebih efektif dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan demokratis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada individu dan institusi berikut ini:

1. IAIN Palangkaraya, yang telah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami di bidang pendidikan. Kami sangat berterima kasih atas sumber daya bimbingan, dan kesempatan akademik yang diberikan oleh universitas selama masa studi kami.
2. Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd, dosen kami yang terhormat, yang telah memberikan bimbingan, wawasan, dan dukungan yang tak ternilai wawasan yang tak ternilai, dan dukungan yang tak henti-

hentinya telah berperan penting dalam pengembangan artikel ini. Masukan umpan balik yang konstruktif dan dorongan di seluruh proses telah memainkan peran penting dalam membentuk isi dari karya ini.

Kepada teman-teman kami, yang telah menjadi sumber dukungan, kolaborasi, dan motivasi selama penyelesaian tugas Ujian Akhir Semester (UAS) ini. Artikel ini tidak akan mungkin terwujud tanpa usaha kolektif, dedikasi, dan kerja sama tim yang telah disumbangkan oleh masing-masing dari kita. Kami sangat menghargai kerja keras dan komitmen yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tim.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 23–31.

Cholisin. (2011). *Pengembangan karakter dalam materi pembelajaran PKN*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Dari, U., Putri, L. E., Rikiawan, R., Sari, N. W., Adha, Z., & Sari, R. M. (2024). Memperkuat keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *3*(1), 264–271.

Erliana, E. Y. (2012). *Penerapan metode simulasi untuk meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 03 Kebak tahun pelajaran 2011/2012* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
Filah, N. (2020). *Hak dan kewajiban warga negara*.

Izzati, F. A., & Novitasari. (2023). Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara bertanggung jawab (civic responsibility). *Kalacakra*, *4*(1), 1–6.

Julfian, J., Rejeki, S., Handayani, S., Sarilan, S., Rizki, A. N., & Lasmi, L. (2023). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk rasa cinta tanah air pada siswa. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 210– 224.

Komalasari, K. (2015). *Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, *2*(3), 420–423.

Ridwan, A., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai tiang hak asasi manusia.
JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, *6*(1), 30–37.

Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4).

Somantri, N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS* (D. Supriadi & R. Mulyana, Eds.). Bandung: PPS-FPIPS UPI.

Suharyanto, A. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, *2*(1), 192–203.

Suryadi, K. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Tilaar, H. A. R. (2004). *Pendidikan multikultural: Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, S. H., Nurandini, N., Ayuninsi, S., Destiani, D., Salmi, S., & Haerani, H. (2025). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *1*(3), 210–219.
Winataputra, A. S. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Yasin, J. (2009). Hak azasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(2), 147–160.

Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal PEKAN*, *6*(1), 104–109.